BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk merupakan sumber penawaran tenaga kerja. Kelahiran atau fertilas menyebabkan pertambahan jumlah penduduk, termasuk jumlah angkatan kerja. Mortalitas menyebabkan berkurangnya jumlah angkatan kerja. Penurunan mortalitas bayi menyebabkan meningkatnya harapan hidup sehingga bayi-bayi yang lahir nantinya akan mencapai usia kerja. Usia kerja sering disebut sebagai usia dimana tenaga kerja secara potensial dapat melakukan kegiatan ekonomi-produktif, yaitu memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Penduduk yang berada dalam usia produktif-ekonomis merupakan salah satu penyebab berkembangnya studi ekonomi kependudukan. Setelah menjadi dewasa, sebagian besar orang merasa masuk ke "Pasar kerja" untuk mencari pekerjaan (sebagai pekerja) atau menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri (sebagai entrepreneur), baik dalam skala besar seperti perusahaan dengan banyak pegawai/buruh ataupun skala kecil di sector informal.[1]

Negara berkembang umumnya menghadapi berbagai masalah mulai dari kemiskinan dan pengangguran hingga

[1] Sri Moertiningsih Adioetomo, Omas Bulan Samosir, *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 197.

kesektor lain tak terkecuali pada masalah ketenagakerjaan. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat, selalu dikatakan dengan tujuan menurunkan angka pengangguran.[2]

Jika melihat struktur penduduk, pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, berusaha untuk mendapatkan (mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.

Pengangguran merupakan bagian dari struktur penduduk suatu Negara. Dalam konteks Indonesia, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.[3]

Kehilangan pekerjaan dapat menjadi kejadian ekonomi yang paling mengerikan dalam kehidupan seseorang. Sebagian besar orang mengandalkan upah mereka untuk mempertahankan standar hidup dan banyak orang bekerja tidak hanya untuk memperoleh pendapatan tetapi juga karena kepuasan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kehilangan pekerjaan dapat menimbulkan beberapa akibat seperti penurunan standar hidup, kekhawatiran tentang masa depan dan hilangnya rasa percaya diri. Oleh karena itu, bukanlah hal

---

[2] Naf'an, *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah, cetakan ke 1,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 136.

[3] Zaini Ibrahim, *Pengantar Eknomi Makro,* (Banten: Kopsyah Baraka, 2017), h. 123-124

mengejutkan apabila politisi-politisi yang sedang berkampanye banyak berbicara tentang program-program mereka yang akan mendukung terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Seseorang yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan tidak berperan apa-apa dalam proses produksi barang atau jasa. Walaupun tingkat pengangguran sampai batas tertentu tidak dapat dihindari dalam perekonomian yang kompleks dengan ribuan perusahaan dan jutaan pekerja, jumlah pengangguran sangatlah bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dari waktu ke waktu. Ketika suatu negara dapat mempekerjakan pekerjanya sebanyak mungkin, negara tersebut akan mencapai tingkat PDB yang lebih tinggi dibandingkan negara yang jumlah pekerjanya tidak maksimal.[4]

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Banten menempati peringkat tertinggi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni sebesar 8,52 persen, bahkan angka ini lebih besar dari rata-rata TPT nasional 5,34 persen. Hal ini disebabkan karena keberadaan 14 ribu industri di Banten menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di ujung Pulau Jawa ini. Bukan hanya itu Upah Minimum Regional (UMR) di Banten terbilang tinggi, sehingga mengurangi minat investor untuk menanam modalnya. Mereka lebih

---

[4] N. Gregory Mankiw, *Principles Of Economics, Pengantar Ekonomi Makro, ……..*, h. 131-132.

memilih mencari wilayah dengan upah yang relative lebih rendah. Bukan hanya itu, persoalan lain karena adanya calo tenaga kerja yang bisa memasukan masyarakat sebagai pegawai disebuah perusahaan. Terutama di kabupaten Tangerang dan Kabupaten serang, sebagai daerah penyumbang industri TPT tertinggi di Banten.

Di Indonesia, khususnya provinsi Banten banyak angakatan kerja yang tidak bekerja disebabkan keahlian yang mereka miliki jauh dari apa yang diharapkan oleh setiap instansi perusahaan. Bukan hanya itu, lapangan pekerjaanpun semakin terbatas sebagai akibat adanya efisiensi di lingkungan perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan para pencari kerja yang ada di Indonesia khususnya provinsi Banten banyak yang memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia.[5]

Salah satu mengapa selalu ada pengangguran dalam perekonomian adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (*job search*) adalah proses yang mempertemukan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengannya. Apabila semua pekerja dan semua jenis pekerjaan sama, sehingga semua pekerja sama-sama cocok dengan semua jenis pekerjaan, maka pencarian kerja tidak akan menjadi masalah. Pekerja-pekerja yang diberhentikan akan secepatnya menemukan pekerjaan baru yang sesuai dengannya, namun pada kenyataannya, para

[5] Bambang Widjajanta dkk, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: CV Citra Praya, 25 Juni 2007), h. 1

pekerja mempunyai selera dan keahlian yang berbeda-beda, pekerjaan-pekerjaan yang ada sangat berbeda satu sama lain.[6]

Lapangan kerja yang ada provinsi Banten belum cukup untuk menampung jumlah pertumbuhan pengangguran, sehingga lulusan pendidikan baik rendah maupun tinggi banyak yang menganggur. Tingkat pengangguran yang tinggi kebanyakan terjadi dikalangan anak-anak muda dan mereka yang telah lebih berpendidikan pada usia 15 sampai 24 tahun.[7]

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Lowongan pekerjaan tersedia selalu disertai dengan kualifikasi pendidikan. Di pasar kerja, kualifikasi pendidikan sangat menentukan untuk memperoleh pekerjaan. Karena keadaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu Negara cenderung dipengaruhi oleh besarnya jumlah orang yang mempunyai penghasilan. Besarnya penghasilan antara lain tergantung dari kualifikasi tenaga kerja (pendidikan, keterampilan dan keahlian) atau regularitas pekerjaan. Faktor lain yang menghambat peningkatan kesejahteraan adalah kalau tingkat

---

[6] N. Gregory Mankiw, *Principles Of Economics, Pengantar Ekonomi Makro,……..,* h. 42.

[7] Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang, Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 298.

pertumbuhan kesempatan kerja lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja.[8]

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Bahkan, ia merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia yang merdeka, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini karena melalui pendidikan, manusia dapat terusmenerus mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemampuan mengembangkan diri inilah yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya, baik itu hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik. Oleh karena itu, pemerintah wajib membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk bersekolah, terlepas dari apapun latar belakang status ekonomi dan sosial mereka, sayangnya pemenuhan hak atas pendidikan ini belum secara penuh dilaksanakan oleh pemerintah. Lebih-lebih, ada pula kebijakan liberalisasi dunia pendidikan yang berujung kepada mahalnya biaya pendidikan. Akibatnya, sebagian warga negara, terutama dari

---

[8] Sri Moertiningsih Adioetomo, Omas Bulan Samosi, *Dasar-Dasar Demografi*,…….., h. 198.

kalangan berpenghasilan rendah, tidak dapat menikmati pendidikan sebagai hak dasar mereka. Belum terpenuhinya hak atas pendidikan ini, tanpa disadari justru memperkuat budaya patrilineal yang telah lama ada di tengah masyarakat. Budaya patrilineal adalah budaya yang memunculkan stereotip gender bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya akan menjadi keluarga orang lain atau bertugas di dapur juga. Bukan hanya dari segi budaya patrilineal saja, salah satu permasalahan yang dianggap paling berat untuk perempuan ialah rekognisi pendidikan untuk perempuan, realitas yang umum kita jumpai perempuan selalu dipandang sebelah mata. Karena pendidikan untuk perempuan tak diterapkan secara fundamental, hanya sebagai formalitas semata atau lebih parahnya jika pandangan bahwa pendidikan untuk perempuan seharusnya tidak diberikan sama sekali, agar tunduk pada system dan semakin terkungkung dalam penindasan. Oleh sebab itu, kualitas pendidikan perempuan menjadi lebih rendah daripada laki-laki.[9]

Bukan hanya dari segi pendidikan saja melainkan dari segi dinamika ketenagakerjaan pun perempuan kerap mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, Padahal terdapat Larangan atas segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk diskriminasi gender, tercantum dalam Undang-

[9] Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2018*, (Banten: CV. Dharmaputra, 2018), h. 27.

Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di sisi lain yang seharusnya dipertimbangkan dalam suatu hubungan kerja adalah keterampilan dan dedikasi, bukan jenis kelamin atau bentuk fisik pekerjanya, hanya saja dunia kerja ternyata mampu menciptakan hukum kebiasaan diskriminatif yang bahkan lebih kuat dan mengikat daripada aturan baku atau undang-undang tertulis.

Beberapa perlakuan yang diskriminatif itu, bahkan telah berlangsung lama dan mengakar di dunia kerja, sehingga dipandang sebagai suatu hal yang lumrah. Oleh karena itu, perempuan secara konsisten terus menerus berada pada posisi yang dirugikan dalam dunia kerja daripada laki-laki. Perlakuan diskriminatif yang biasa terjadi dalam pekerjaan, dimulai sejak masa penerimaan. Bentuknya, berupa pengumuman lowongan kerja yang memberikan beberapa persyaratan tertentu kepada perempuan. Persyaratan tersebut, antara lain misalnya: berpenampilan menarik, belum menikah, siap tidak menikah selama masa kontrak atau bersedia tidak hamil sampai batas waktu tertentu dan sebagainya.

Bentuk-bentuk diskriminatif yang dialami perempuan calon pekerja di atas, sebenarnya merupakan wujud lain dari eksploitasi terhadap wanita. Selain itu ada pula unsur pelanggaran HAM, manakala pemberi kerja mensyaratkan keharusan untuk bersedia tidak menikah atau bersedia tidak

hamil selama dalam waktu tertentu. Semua bentuk diskriminasi di atas, jelas mengurangi dan bahkan dapat menghilangkan sama sekali kesempatan seorang perempuan yang berpendidikan sekalipun untuk bekerja.

Namun demikian, Betapapun juga, diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan sepertinya mulai berkurang. Kondisi ini setidaknya berlaku untuk wanita yang sudah memiliki keahlian (SMK dan Diploma I/II/III). Selain itu, rendahnya selisih angka TPT perempuan dengan laki-laki lulusan universitas, juga dapat menjadi penanda bagi berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan. Hanya saja, tingkat pengangguran di kalangan wanita lulusan SMA Umum, memang jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki.[10] Sebagaimana yang terlihat pada tabel gambar dibawah ini.

[10] Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2018*, (Banten: CV. Dharmaputra, 2018), h. 31-32.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Banten
Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki
Agustus 2018 (Persen).

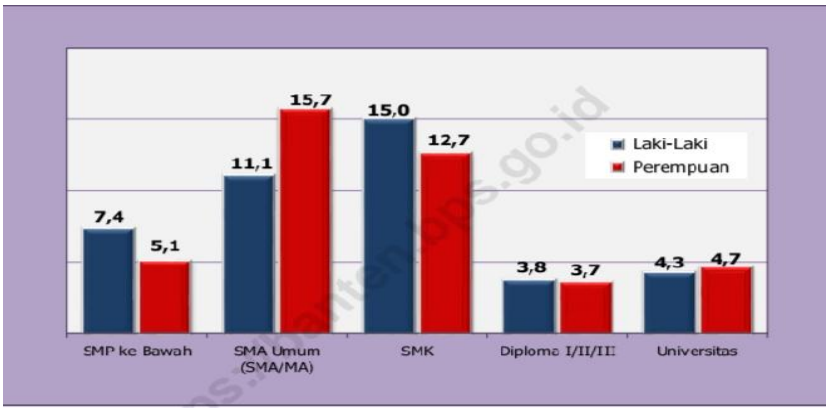

Sumber: BPS Provinsi Banten (data diolah)

Gambar 1.1

Angkatan kerja yang berpendidikan SMA/SLTA sepertinya sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing dengan angkatan kerja berpendidikan SD dalam mendapatkan pekerjaan tanpa kualifikasi pendidikan. Mereka pun kalah bersaing dengan angkatan kerja yang mempunyai pendidikan lebih tinggi (Diploma dan Universitas). TPT penduduk berpendidikan SMA/SLTA (umum dan kejuruan) tercatat paling tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Pada Agustus 2018, angkatan kerja berpendidikan SMA/SLTA (umum dan kejuruan) yang menganggur khususnya pada perempuan sekitar 90.644 ribu orang.

SMA/SLTA (umum dan kejuruan) didirikan untuk menciptakan siswa yang siap bekerja, namun ternyata lulusan SMA/SLTA (umum dan kejuruan) masih kalah bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. TPT penduduk berpendidikan SMA/SLTA (umum dan kejuruan) yang cukup tinggi memberikan gambaran bahwa tujuan dari pendirian SMA/SLTA (umum dan kejuruan) belum tercapai.

Terlebih siswa SMK sudah mempunyai keahlian, oleh karena itu sebaiknya mereka diarahkan untuk menjadi wirausaha dibanding menjadi pegawai. Bantuan berupa permodalan dan pemasaran bagi lulusan SMA/SLTA (umum dan kejuruan) merupakan salah satu langkah untuk menekan tingkat pengangguran lulusan SMA/SLTA (umum dan kejuruan) khususnya pada perempuan.

Berdasarkan data pengangguran terbuka khususnya pada perempuan berdasarkan kabupaten/kota dan pendidikan tinggi yang ditamatkan di provinsi Banten, angka pengangguran didominasi oleh pengangguran lulusan SMA/SLTA, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penduduk Banten Berumur 15 Tahun Ke Atas
yang Termasuk Pengangguran Terbuka Berdasarkan
Kabupaten/Kota dan
Pendidikan Tertinggi yang Di Tamatkan
Pada Perempuan (2014-2018).

Tahun	**Pendidikan Tinggi yang Di Tamatkan**					**Jumlah/ Total**
	Tidak Punya Ijazah SD	**SD**	**SLTP**	**SLTA**	**Diploma/ Universitas**	
2018	6.329	13.149	35.060	90.644	15.214	**160.396**
2017	8.045	19.518	33.983	86.427	16.313	**164.286**
2016	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015	4.497	26.913	44.082	82.507	15.867	**173.866**
2014	6.306	22.726	44.773	77.329	12.824	**163.958**

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah).

Pengangguran Terbuka pada perempuan berdasarkan kabupaten/kota dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di provinsi Banten setiap tahunnya mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, padahal berdasarkan data BPS jumlah angkatan kerja pada perempuan berdasarkan kabupaten/kota setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penduduk Banten Berumur 15 Tahun Ke Atas
yang Termasuk Angkatan Kerja Berdasarkan Kabupaten/Kota
dan
Pendidikan Tertinggi yang Di Tamatkan
Pada Perempuan (2014-2018).

Tahun	**Pendidikan Tinggi yang Di Tamatkan**					**Jumlah/Total**
	Tidak Punya Ijazah SD	**SD**	**SLTP**	**SLTA**	**Diploma/ Universitas**	
2018	274.737	427.859	358.768	624.281	339.552	**2.025.197**
2017	260.515	395.456	329.738	576.552	324.925	**1.887.186**
2016	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2015	252.553	392.542	304.669	499.872	303.465	**1.753.101**
2014	298.631	389.292	329.693	521.423	252.181	**1.791.220**

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah).

Jumlah pengangguran pada perempuan didominasi oleh lulusan SLTA dibandingkan dengan lulusan SLTP dan SD. Hal ini menjadi sumber permasalahan yang harus dipecahkan, karena seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang ditamatkan semakin tinggi pula kemampuan yang dimiliki, karena pendidikan disiapkan untuk investasi masa depan, sehingga diharapkan apabila seseorang mengenyam pendidikan ia dapat menambah dan mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya dan dapat

meningkatkan pembangunan terutama dalam bidang kesejahteraan.[11]

Dari beberapa masalah yang diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Perempuan di Provinsi Banten Tahun 2014-2018".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran di Provinsi Banten menduduki angka pengangguran tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 8,52 persen bahkan angka ini lebih besar dari rata-rata TPT nasional 5,34 persen.
2. Dalam segi pendidikan dan ketenagakerjaan, perempuan masih dianggap sebelah mata dengan berbagai persepsinya, salah satunya dalam segi pekerjaan (ketenagakerjaan) yakni masih melekatnya stereotif budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat mengenai peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama masih menjadi faktor dominan yang membatasi

[11] Michael P. Todaro, Stephan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1, Terjemahan Agus Dharma*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 60.

perempuan untuk bekerja, karena peran utama perempuan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, sehingga banyak yang beranggapan peran pekerja perempuan dianggap sebagai penyebab keretakan rumah tangga atau ketidakberhasilan anak-anaknya karena kurang meluangkan waktu di rumah. Dilihat dari segi pendidikan banyak juga yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi, hal tersebut dikarenakan persepsi disekalangan masyarakat yang beranggapan bahwa percuma perempuan menempuh pendidikan tinggi karena ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga juga. Padahal kecerdasan anak umumnya diturunkan oleh ibu yang cerdas.

3. Tingkat pengangguran di kalangan wanita lulusan SMA Umum jauh lebih tinggi yaitu sebesar 15,7 persen dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sebesar 11,1 persen.
4. Tingkat pengangguran di provinsi Banten khususnya pada perempuan masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi, yaitu lulusan SMA/SLTA sebesar 15,7 persen per periode Agustus 2018 dibandingkan dengan tingkat pendidikan lulusan SMP kebawah yang hanya sebesar 5,1% maupun lulusan tingkat pendidikan yang lainnya.

5. Jumlah angkatan kerja pada perempuan berdasarkan kabupaten/kota dan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di provinsi Banten terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan penduduk banten yang bekerja untuk perempuan memang sedikit meningkat, namun perempuan masihlah rendah atau dibawah laki-laki yaitu hanya sebanyak 1,86 juta sedangkan untuk laki sebanyak 3,47 juta, jika dilihat persemester penduduk yang bekerja untuk perempuan cenderung menurun yang dimana pada februari 2018 sebanyak 2,08 juta sedangkan pada agustus 2018 sebanyak 1,86.
6. Jumlah angkatan kerja pada perempuan berdasarkan provinsi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan setiap tahunnya selalu meningkat dan didominasi oleh lulusan SLTA yaitu sebanyak 624.281 juta, begitupun jumlah pengangguran terbuka pada perempuan berdasarkan provinsi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan setiap tahunnya selalu meningkat dan didominasi oleh lulusan SLTA pula yaitu sebanyak 90.644 juta, hal inilah yang menjadi dasar permasalahan bahwa kesempatan kerja pada jenjang tersebut untuk perempuan masihlah rendah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, tidak meluas dan tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah direncanakan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018.
2. Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk menilai dan mengukur tingkat pendidikan dengan menganalisis jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun keatas) yang termasuk angkatan kerja berdasarkan kabupaten/kota dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di provinsi Banten tahun 2014-2018 pada jenis kelamin perempuan, serta menganalisis pengangguran terbuka berdasarkan kabupaten/kota dan Pendidikan tinggi yang ditamatkan di provinsi Banten tahun 2014-2018 pada jenis kelamin perempuan.
3. Dalam variabel tingkat pendidikan, penulis memfokuskan pada angkatan kerja perempuan berdasarkan kabupaten/kota dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu SMA/SLTA tahun 2014-2018.
4. Dalam variabel pengangguran, penulis memfokuskan pada jumlah pengangguran terbuka perempuan berdasarkan kabupaten/kota dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu tamatan SMA/SLTA tahun 2014-2018.
5. Mengenai periode waktu data pada penelitian ini yaitu dari tahun 2014-2018. Namun untuk periode waktu pada tahun 2016 peneliti tidak mencantumkannya dikarenakan

terdapat kekurangan yakni data untuk angkatan kerja maupun pengangguran berdasarkan kabupaten/kota dan pendidikan tinggi yang ditamatkan, Badan Pusat Statistik tidak menyediakan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, serta untuk memperjelas masalah yang akan diteliti maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018?
2. Seberapa besar hubungan pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018?
2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018?

F. Manfaat /Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran pada perempuan.
   b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama penelitian mengenai tingkat pengangguran pada perempuan.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Peneliti

      Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Peneliti bisa mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018.
   b. Bagi Pemerintah Daerah

      Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018, khususnya pada tingkat pendidikan serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan yang

tepat dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran khususnya pengangguran pada perempuan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran perempuan terutama yang berkaitan dengan tingat pendidikan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.[12] Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Tingkat Pengangguran Perempuan di Provinsi Banten tahun 2014-2018.

Pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.[13] Tingkat pengangguran terbuka pada perempuan berdasarkan provinsi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Banten dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan, namun tingkat pengangguran

[12] Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian, Ekonomi dan Bisnis, Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11.

[13] Zaini Ibrahim, *Pengantar ekonomi Makro,*……., h.123.

perempuan pada jengang pendidikan SMA lebih tinggi sebesar 15,7 persen dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sebesar 11,1 persen.

Secara umum, berdasarkan hasil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Agustus 2018, TPT perempuan tercatat lebih rendah dibanding TPT laki-laki. TPT perempuan sebesar 7,92 persen dan TPT laki-laki sebesar 8,84 persen, hal ini menandakan bahwa perempuan telah mendapat kesempatan kerja yang setara dengan laki-laki. Pemberian kesempatan kerja dewasa ini tidak lagi membedakan gender.[14] Namun untuk TPT tertinggi pada perempuan khususnya berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah (SMA) yaitu sebanyak 90.644 juta jiwa. Dengan kata lain ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan sekolah menengah. Sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja.

Pengangguran terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendidikan. Faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di provinsi Banten khususnya pada perempuan.

---

[14] Badan Pusat Statistic Provinsi Banten, *Laporan eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Banten agustus 2018*, (Banten: CV. Dharmaputra, 2018), h. 5

2) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Perempuan di provinsi Banten 2014-2018.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan masa depan suatu bangsa dan dapat menjadi penentu kemajuan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat dipandang sebagai human investment, karena dengan pendidikan maka manusia terdidik dapat menjadi modal (modal manusia/human capital) bagi pembangunan ekonomi.[15]

Keadaan angkatan kerja Provinsi Banten bulan Agustus 2018 memperlihatkan jumlah angkatan kerja mengalami sedikit kenaikan dari 5,60 juta orang pada Agustus 2017 menjadi 5,83 juta orang pada Agustus 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten turun dari 9,28 persen pada Agustus 2017 menjadi 8,52 persen pada Agustus 2018. TPT Provinsi Banten menempati peringkat tertinggi nasional. Sebaliknya, jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dari 5,08 juta orang menjadi 5,33 juta orang. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami hal yang sama, meningkat dari 62,32 persen menjadi 63,49 persen. TPAK

---

[15] Khusnul Khotimah, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015, (*Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), h. 48, http://eprints.uny.ac.id/, diunduh pada tanggal 03 November 2019.

sebesar 63,49 persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 hingga 64 orang yang aktif secara ekonomi.

Bias gender masih sangat terlihat pada bidang ketenagakerjaan. Perempuan yang aktif secara ekonomi masih sangat sedikit jumlahnya dibanding laki-laki. Hal ini terlihat dari TPAK perempuan yang sebesar 44,93 persen, hanya separuh dari TPAK laki-laki yang sebesar 81,40 persen. Posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah menjadikan laki-laki lebih aktif secara ekonomi dibanding perempuan, sedangkan perempuan lebih banyak berperan sebagai pengurus rumah tangga.[16]

Angka pengangguran tertinggi khususnya pada perempuan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh pengangguran lulusan SLTA dibandingkan dengan lulusan SD dan SLTP. Hal ini menjadi masalah yang harus dipecahkan karena seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kemampuan yang dimiliki karena pendidikan disiapkan sebagai investasi masa depan, sehingga apabila seseorang mengenyam pendidikan, ia dapat menambah dan mengembangkan potensi yang ada

[16] Badan Pusat Statistic Provinsi Banten, *Laporan eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Banten agustus 2018*, (Banten: CV. Dharmaputra, 2018), h. 3-5

didalam dirinya dan dapat meningkatkan pembangunan terutama dalam bidang kesejahteraan.[17]

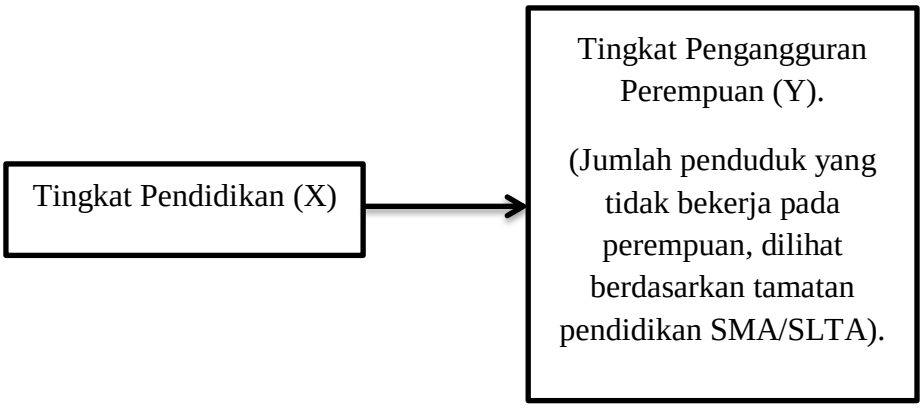

Gambar 1.2 Paradigma Penelitian

Dalam kerangka pemikiran di atas penulis mencoba untuk menguraikan apakah tingkat pendidikan (X) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran perempuan (Y) di provinsi Banten tahun 2014-2018. Sehingga dari kerangka pemikiran di atas dapat dibuat menjadi hipotesis penelitian.

H. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan

[17] Michael P. Todaro, Stephan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1, Terjemahan Agus Dharma*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 60.

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teoretis yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdiri dari paparan teori pendidikan dan pengangguran, penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antar variabel dan hipotesa.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi tentang: waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang: hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan yang analitis dan terpadu.

Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran yang berisi tentang: kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan atau saran berdasarkan temuan dari hasil penelitian.